

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum sifatnya universal, hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini, primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum, dimana hukum mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua* sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan sarana tertentu.¹ Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbulah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya saling pengaruh mempengaruhi. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, kelompok

¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.v Kata Pengantar.

berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin mempertahankan eksistensinya.²

Permasalahan pidana terkait Anak sebagai pelaku maupun sebagai korban merupakan salah satu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah masyarakat dan permasalahan dalam penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana merupakan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Data Komnas Perempuan dan Anak, telah menerima 26 ribu kasus anak dalam kurun 2011 hingga September 2017. anak yang berhadapan dengan hukum merupakan laporan tertinggi yang diterima KPAI. “Anak berhadapan dengan hukum sebanyak 34 persen salah satu contohnya kasus kekerasan Thamrin City. Selanjutnya permasalahan keluarga dan pengasuhan 19 persen,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam diskusi ‘Stop Bullying di Sekolah’ di DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017). Kasus lain yang diterima oleh KPAI seperti masalah pendidikan serta pornografi dan cybercrime. Retno pun menyayangkan kasus bully di Thamrin City yang berujung pencabutan KJP anak pelaku bully. “Melihat kasus Thamrin di mana 9 anak melakukan kekerasan di mana para pelaku KJPnya dicabut kemudian dikeluarkan dari sekolah. Ini akan menjadi masalah baru karena sama saja pelaku dicabut hak anaknya untuk mendapat pendidikan,” lanjut Retno.

“Memang ini kasus kekerasan tapi karena pelaku dan korban adalah anak-anak, penyelesaian masalah ini tidak harus masuk ranah hukum,” sambung Retno.³

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, cet.viii, 2003, hlm.5.

³ Davit Setyawan, *KPAI Terima Aduan 26 Ribu Kasus Bully Selama 2011-2017*, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 23.05 Wib

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri Anak tersebut, berdasarkan data terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan tingkat kriminalitas, dan pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif semakin meningkat.⁴

Berbagai perbuatan dan tingkah laku anak pelaku tindak pidana memerlukan pertimbangan yang khusus dalam menghadapi dan menanganinya karena kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang

⁴ Kristiyanto, *Sosialisasi-Ruu-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 19.00 wib

khass. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum—apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.⁶

⁵ M. Nasir Djamil (pimpinan Panja Sistem Peradilan Pidana Anak Komisi III DPR RI), 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, hlm. 1.

⁶ Ibid hlm.8

Seringkali pusat perhatian masyarakat mengarah pada sangsi pidana, yang pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Walaupun yang menjadi titik kritik yang paling sering adalah kelemahan/keburukannya yang digambarkan oleh sebagian besar kalangan sebagai perlakuan yang kejam. Terkait hal tersebut untuk membatasi penggunaan pidana, maka diterapkanlah sanksi-sanksi lain salah satunya yaitu pidana denda yang tidak bersifat pidana, yang bersifat perdata, mirip dengan pembayaran yang harus dibayarkan pada perkara perdata, terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Namun dalam hukum pidana, denda dibayarkan kepada negara. Seperti halnya yang dikemukakan Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh Suhariyono yang mengatakan bahwa, “pidana denda bermula dari hubungan keperdataan”.⁷ Bahwa ketika seseorang dirugikan orang lain, ia boleh menuntut ganti rugi atas kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang tengah dirugikan. Penguasa pun hendaknya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan, atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gugatan. Jadi, pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan maka boleh menuntut ganti kerugian atas kerusakan yang jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang

⁷ Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012, hlm. 167.

membuat pelanggaran. Dalam perkembangannya, yang dirugikan mendapatkan pembagian yang semakin menurun dan penguasa mendapat pembagian hasil yang semakin baik dan akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian.⁸

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP yang menjadi urutan ke empat setelah ketiga jenis pidana yakni pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, sering dijadikan pilihan oleh pembentuk undang-undang di luar KUHP sebagai alternatif atau kumulatif atau keduanya dari pidana penjara atau kurungan.⁹ Pada saat pidana denda digunakan dan ditentukan sebagai pidana alternatif atau pidana yang diancamkan secara tunggal dalam beberapa pelanggaran yang ditentukan dalam Buku III KUHP, maka orang beranggapan bahwa pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok, akan mempunyai efek jera dan hal ini merupakan bagian dari penderitaan. Paling tidak, pidana denda dapat dijadikan bagian dari perlindungan masyarakat dan sekaligus pembimbingan. Pidana denda ini merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penambahan penderitaan dan yang sebenarnya terjadi adalah pemindahan penderitaan.¹⁰

Menurut Muladi,¹¹ tujuan pembedaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

¹¹ Muladi, *op.cit.*, hlm. 2.

sinkronisasi kultural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana tersebut merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Dalam hal menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, pemidanaan terhadap Anak harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mental anak, sehingga harus diadakan perlakuan yang berbeda di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, dengan tujuan untuk lebih mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat.

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...(anak dengan alasan fisik dan ketidak matangan mental, membutuhkan perlindungan dan kepedulian, termasuk perlindungan hukum yang

tepat, sebelum dan sesudah kelahirannya)” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “First Call for Children”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “survival protection, development and participation. (kelangsungan hidup, pengembangan dan partisipasi)”¹²

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan negara”. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sendiri merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, 2002, hlm 4.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan negara". Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sendiri merupakan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sistem pemidanaan terhadap anak yang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana sama halnya dengan pelaku orang dewasa. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan /perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.¹³ Anak yang melakukan tindak pidana harus

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat, Ed.1, Cet.2, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm.43.

diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat punitive sehingga merugikan si anak itu sendiri. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.

Pada Tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SP2A). Jika diperbandingkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum, dibandingkan dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan komprehensif karena didalam undang-undang ini seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

Disamping itu, dalam sumber daya manusianya, aparat penegak hukumnya khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan penradilan anak. Demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penahanan sementara anak ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penempatan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa.

Konsep Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak, Restorative Justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ketika kasus anak telah dilaporkan di Kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yang kemudian diterapkan sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur pembalasan. Jadi Restorative Justice diartikan sebagai keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan bagi korban, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam dan penghukuman terhadap pelaku.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, pada tahapan pemeriksaan ditingkat proses hukum baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan diharuskan Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan upaya Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif, Syarat untuk dilakukan Diversi tentunya dengan kejahatan yang ancaman hukumannya kurang 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun jika dalam

proses tidak menghasilkan penyelesaian maka kasus Anak yang beronflik dengan hukum diproses di pengadilan dengan menggunakan pendekatan peradilan anak.

Pada proses ini, dilakukan dengan memperhatikan usia anak yakni khusus anak dibawah 12 tahun dilakukan hukuman tindakan dan anak berumur 12 tahun hingga umur 18 tahun dilakukan hukum tindakan dan pembedanaan.

Mengapa anak sampai tega melakukan tindak pidana, hal ini ada beberapa kemungkinan antara lain kurangnya pendidikan moral atau agama.atau mungkin juga melihat film kekerasan yang kemungkinan ditiru tanpa mengetahui akan berdampak pada ancaman pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Larangan itu merupakan dasar bagi adanya perbuatan pidana. Dapat pula dikatakan, bahwa justru asas legalitas inilah yang merupakan dasar dari pada “perbuatan pidana”. Tanpa adanya peraturan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang terlarang, maka kita tidaklah mengetahui adanya perbuatan pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan –perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Pada bulan Juni 2016 sejumlah siswa SMP Sahara Kota Padang merayakan kelulusannya dengan konvoi sepeda motor di jalan-jalan Kota Padang, tanpa sebab

yang jelas salah satu Anak yaitu Fauzan Arsi Putra yang dibonceng oleh temannya melayangkan Gear yang telah diikatkan ke sabuk dengan serampangan saat melewati sejumlah siswa dari SMPN 12 Kota Padang yang kebetulan sedang berjalan di trotoar sehingga Gear tersebut mengenai muka anak Gion Salendra yang mengakibatkan luka parah pada matanya. Orang tua dari Gio Salendra merasa tidak senang karena anaknya menderita luka parah kemudian melaporkan Fauzan Arsi Putra ke Polresta Padang sehingga Fauzan Arsi Putra diproses secara hukum dimana saat itu Fauzan Arsi Putra berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana pihak Polresta Padang memproses Anak tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka kami mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus putusan perkara Nomor :07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg?
2. Apa dasar dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus putusan perkara Nomor :07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg?
3. Apakah tuntutan Penuntut Umum dan putusan Hakim telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus perkara dalam kasus putusan perkara Nomor :07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg?
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus putusan perkara Nomor :07/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Pdg?

3. Apakah Pemidanaan yang diterapkan oleh Penuntut Umum maupun Hakim Anak sudah sesuai dengan SOP dan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum dan penegak hukum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang relevan dan berhubungan serta cocok untuk dipakai membahas dan mengkaji permasalahan yang disajikan menurut persepsi penulis adalah :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theory)

Dalam bahasa latin teori absolut disebut juga quia peccatum, teori ini muncul pada abad 18 yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Palak da beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya

pada filsafat katolik dan demikian pula sarjana Islam yang mendasarkan teorinya pada qishas dalam Al Quran.¹⁴Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹⁵ Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan , hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Pelaku tindak pidana harus dibalas.

2. Teori Relatif dan tujuan (doeltheorie)

Pemidanaan harus mempunyai tujuan yaitu pencegahan (deterence), yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Prevensi umum (General Deterence)

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekan sampai revolusi Perancis, prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat takut melihatnya. Untuk itu terkenal adagium “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccatur*” (supaya

¹⁴A.Z Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, hal 45

¹⁵Ibid, ham 45

khalayak ramai betul-betul takut melaksanakan kejahatan maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum)¹⁶

b. Prevensi khusus (Special Deterrence atau Individual Deterrence)

Prevensi khusus dianut oleh Van Hammel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hammel menunjukkan bahwa Prevensi Khusus suatu pidana adalah :

- 1) Pidana harus memuat sesuatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum¹⁷

3. Teori Gabungan (Vereenings Theorïe)

Teori Gabungan (Vereenings Theorïe) mendasarkan pembedaan kepada perpaduan antara teori pembalasan (Vergeldings Theorïe) dengan teori tujuan (Doeltheorien). Teori Gabungan (Vereenings Theorïe) tidak saja mempertimbangkan masa lalu

¹⁶Ibid, ham 48

¹⁷ Ibid, hal 50

(seperti yang terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud dalam teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.

F. Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep – konsep yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Jika dihubungkan dengan proposal ini maka dapat kita mengetahui bagaimana pengaturan dalam tatanan Norma Undang-Undang yang mengatur mengenai Anak.

2. Tujuan

Pengertian tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan kata benda yang dapat diartikan yakni cita-cita, maksud, sasaran, sehingga tujuan dapat diartikan merupakan suatu cita-cita dan impian yang hendak diraih untuk mewujudkan cita-cita dimaksud oleh suatu organisasi dimasa depan. Jika dihubungkan dengan proposal ini maka dapat diartikan maksud dan cita-cita pemidanaan yang hendak diraih harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari Peradilan Anak yaitu untuk

memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan..

3. Pidanaaan

Sebelum membicarakan masalah pidanaaan, terlebih dahulu akan dibahas pengertian pidana. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi sebenarnya kedua istilah ini tidaklah sama karena hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”¹⁸

Mulyatno berpendapat, bahwa istilah “*hukuman*” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*” adalah istilah-istilah yang konvensional.¹⁹ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut, dan menggunakan istilah “pidana” untuk menterjemahkan perkataan “*straf*” dan istilah “diancam dengan pidana” untuk menggantikan istilah “*wordt gestraf*.” Menurutnya, kalau kata “*straf*” itu kita terjemahkan dengan “hukuman,” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai

¹⁸ R. Sugandi, *KUHP Dengan Penjelasan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, hlm.5

¹⁹ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diklat Hukum Panitensier*, Padang, 2002, hlm.10

“hukum-hukuman.” Lebih jauh beliau menjelaskan, “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁰

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja; tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah yang dipakai adalah “penghukuman”, atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditional*” atau “*veroorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dipidana bersyarat”. Akhirnya Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat dari pada memakai istilah “hukuman.”²¹

Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, Sudarto mengatakan :²²

²⁰*Ibid*, hlm. 11

²¹*Ibid*, hlm. 12

²² P.A.F. Lamintang,, *Op.cit*, hlm. 49

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*. Dengan demikian, pembedanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²³ Dalam hal ini pembedanaan yang dimaksud adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana anak yang masih dibawah umur sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Tujuan Pembedanaan

Pembedanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pembedanaan bukan semata-mata dilihat sebagai suatu penjatuhan pidan

²³ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 73

saja, melainkan dalam pemidanaan itu juga terkait lembaga-lembaga pidana.

Dalam seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 telah merumuskan hal berikut:²⁴

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitasi*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Peradilan pidana sekarang ini didasarkan atas beberapa tingkat yang tujuannya antara lain adalah membatasi wewenang yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu. Wewenang yang ada pada negara dibatasi dan didesak sampai kepada fungsinya untuk menegakkan ketertiban masyarakat.

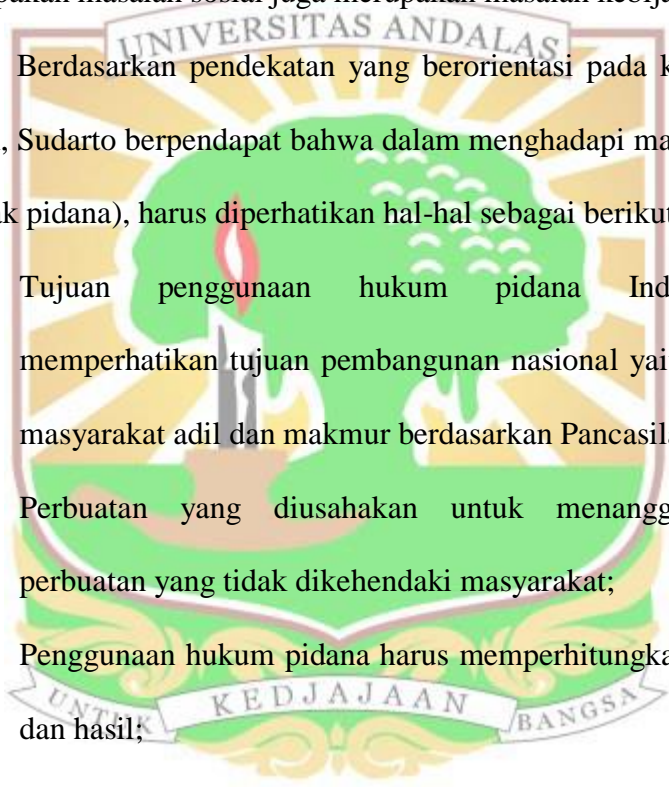
Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (dalam pengertian sosiologi) atau membangkang (dalam pengertian kriminologi) yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang luput dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan sosial dalam masyarakat. Dengan

²⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 38

demikian, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.²⁵

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum nasional, yaitu segala usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi masalah penanggulangan kejahatan, selain merupakan masalah sosial juga merupakan masalah kebijakan.

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kejahatan (tindak pidana), harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁶

- 
- a. Tujuan penggunaan hukum pidana Indonesia harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. Perbuatan yang diusahakan untuk menanggulangi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat;
 - c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
 - d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan daya kerja badan penegak hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 40

²⁶ *Ibid*, hlm. 41

terhadap perbuatan itu dikenakan sanksi yang tegas oleh penguasa serta untuk mencegah terjadinya kekacauan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana dijatuhkan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban yang sudah ada dalam masyarakat.

Di Indonesia, penjatuhan pidana bertujuan untuk membina diri terpidana agar dapat menjadi baik dengan memberikan pendidikan dan latihan yang berguna bagi diri mereka dan masyarakat, setelah mereka menjalani masa pidana. Oleh karena itu dalam sistem hukum Indonesia, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, karena Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan bertujuan untuk membina terpidana agar dapat menjadi orang baik, sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang sadar hukum.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep Rancangan KUHP Baru pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam merumuskan itu, konsep bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.²⁷

Dengan berkembangnya sistem Restorative Justice (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku

²⁷ *Ibid.* hlm. 36

mengembalikan keadaan kepada kondisi semula, keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. pemahaman ini telah diakomodir oleh R-KUHP tahun 2012 yang pada BAB III dengan judul Pidanaan dalam pasal 54 R-KUHP tersebut dijelaskan Tujuan pidanaanan yakni :

Pasal 54 ayat (1) :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan nama hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;
- e) Memaafkan terpidana.

Pasal 54 ayat (2) R-KUHP “Pidanaanan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

G. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, azas-azas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan data-data sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

b. Data Sekunder

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian seperti buku-buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

c. Data Tertier

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari majalah dan surat kabar, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Field research ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan serta pandangan para pakar hukum tentang permasalahan penelitian.

Cara memperoleh bahan hukum tersebut adalah dengan melakukan wawancara terstruktur.

3. Analisis

Untuk menyimpulkan hasil penelitian dan untuk mencapai hasil yang obyektif maka bahan hukum disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan bahan hukum bertujuan untuk menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk memisahkan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

